



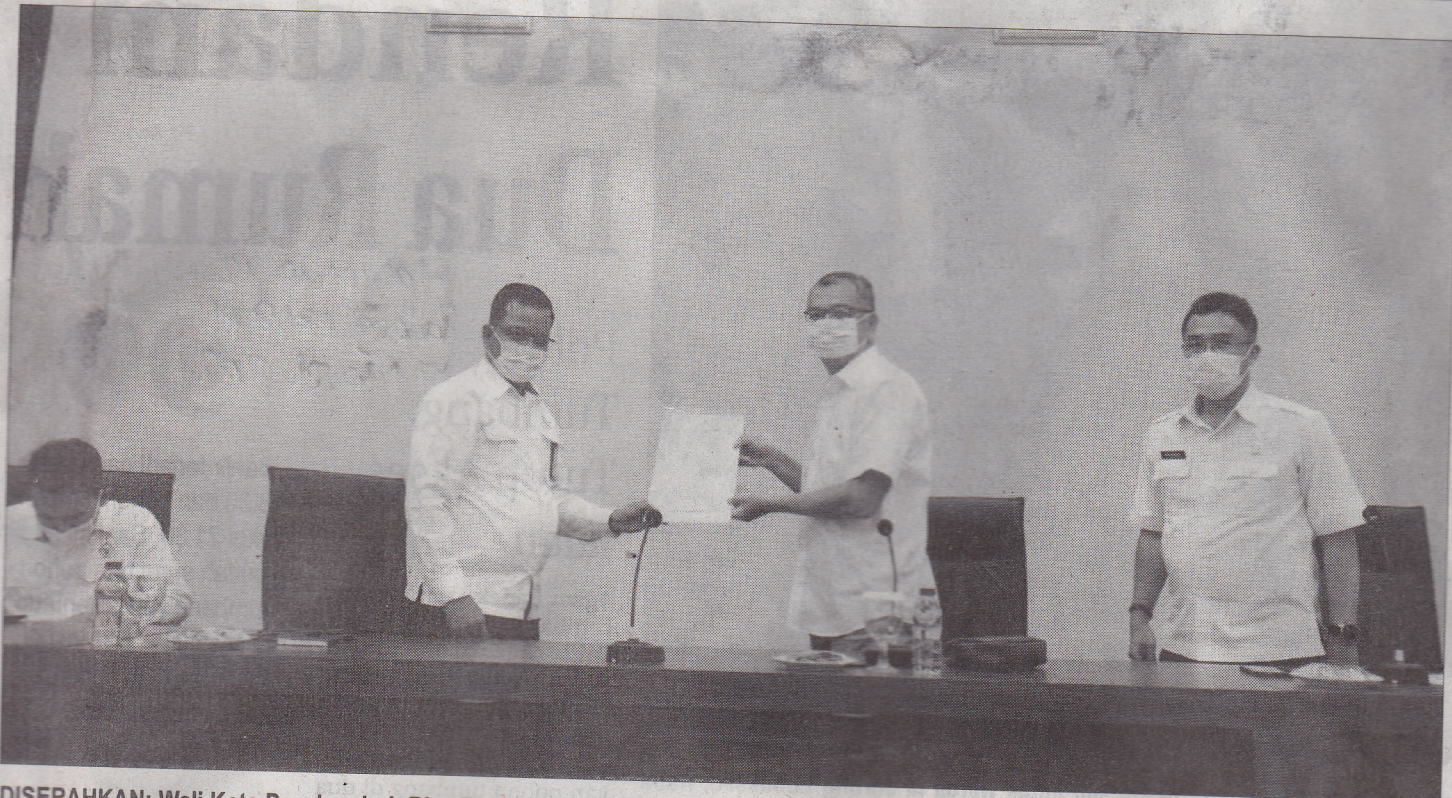
KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	12
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



DISERAHKAN: Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi ketika menyerahkan LKPD di BPK RI Perwakilan Sumbar.

Wali Kota "Ultimatum" Kepala OPD

Jangan Ada Keterlambatan Data saat Pemeriksaan BPK

Payakumbuh, Padek-Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi Datuak Rajo Ka Ampek Suku mengultimatum seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota ini. Mantan "senator" Sumbar di DPD RI itu meminta seluruh kepala OPD agar betul-betul bersikap kooperatif, selama auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumbar, melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2020.

"Jangan sampai ada keterlambatan data atau ada kepala

dinas yang sulit dihubungi selama proses pemeriksaan. Apa yang kurang saat diperiksa, carikan cepat. Kalau perlu tahan anak buah pulang kalau belum selesai. Biar proses pemeriksaan ini berjalan lancar. Kalau ada saya temukan yang main-main, nanti bakal berurusan dengan saya," tegas Riza Falepi, Rabu lalu (10/3).

Riza menyebut, bila masih ada persoalan administrasi (dalam LKPD, red), itu semua tidak lepas dari kelemahan seorang aparatur sebagai manusia, dan itu bisa dibenahi asal tetap patuh kepada aturan.

"Kepatuhan berbanding lurus dengan kerapian menjalankan birokrasi. Jangan menunggu-nunggu menyelesaikan administrasi, karena ini adalah pangkal segala persoalan. Jadi kan ritme akhir tahun kalau dapat selesaikan laporan keuangan kita. Jangan pas di awal tahun barunya diselesaikan. Ini tolong diperbaiki ke depan," kata Riza.

Menurut Ketua Tim Pemeriksa LKPD Payakumbuh Tahun 2020 dari BPK RI Perwakilan Sumbar, Azmi Seftriadi, Pemko Payakumbuh adalah urutan keempat atau entitas pemerintah daerah keempat di Sumbar yang menyerahkan LKPD kepada BPK. Sementara itu, sampai saat ini masih ada beberapa pemda yang belum menyampaikan laporan keuangan daerah mereka.

"LKPD ini dalam amanat konstitusi, paling lambat tiga bulan diserahkan setelah berakhirnya tahun anggaran. Payakumbuh termasuk yang cepat menyerahkan dengan sudah 5 kali WTP adalah prestasi yang cukup bagus diraih Payakumbuh," ujar Azmi Seftriadi.

Dia menyebut, setelah melaksanakan pemeriksaan, nantinya paling lama tanggal 4 Mei 2021 sudah dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas LKPD Pemko Payakumbuh.

"*Insyallah* sebelum lebaran kami sudah menyelesaikan LHP-nya. Proses pemeriksaan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai 8 April 2021. Kami berharap kerjasamanya dengan baik," kata Azmi. (frv)